

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

TED merupakan organisasi *non-profit* yang didedikasikan untuk menyebarkan ide-ide, biasanya dalam bentuk pembicaraan singkat dan kuat (18 menit atau kurang). TED dimulai pada tahun 1984 sebagai konferensi di mana teknologi, hiburan, dan desain bertemu, dan saat ini mencakup hampir semua topik seperti, mulai dari sains, bisnis hingga masalah *global* dalam lebih dari 100 Bahasa. Salah satu topik yang hangat dibicarakan dalam konferensi ini ialah mengenai kesetaraan *gender*. TED Indonesia juga cukup sering mengadakan konferensi yang mengangkat topik mengenai kesetaraan *gender* dengan mendatangkan tokoh perempuan sebagai *speaker*. Diantaranya yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hayu yang menyuarakan pesan kesetaraan *gender* di kehidupan modern saat ini melalui pidato nya yang berjudul “*Being a Modern Royal Javanese Princess*”. GKR Hayu menjelaskan bagaimana kesetaraan *gender* diimplementasikan di kebudayaan Jawa yang selama ini ia anut sebagai putri kerajaan keraton. Selain GKR Hayu, melalui TEDx Talks Ka’bati juga menyuarakan pesan kesetaraan *gender* dalam kebudayaan Minangkabau di kehidupan modern saat ini melalui pidato nya yang berjudul “*Post Feminisme Minangkabau*” (TED.com, 2021).

Gusti Kanjeng Ratu Hayu atau biasa dipanggil GKR Hayu merupakan putri keempat Sultan Hamengku Buwono X. Beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang menentang adanya budaya patriarki. GKR Hayu memiliki pandangan mengenai kesetaraan *gender*, ia menganggap bahwa setiap perempuan dapat setara dengan laki-laki. GKR Hayu ingin memecah atau menghilangkan *stigma* masyarakat terhadap perempuan Jawa khususnya putri kerajaan keraton yang posisi nya ditempatkan di bawah laki-laki di segala aspek kehidupan (Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 2020).

Selain GKR Hayu, Ka’bati juga merupakan salah satu tokoh masyarakat yang menentang adanya budaya patriarki. Ka’bati adalah seorang ibu, penulis,

jurnalis di salah satu media *online* dan salah satu pendiri Ruang Kerja Budaya (RKB), sebuah organisasi *non-profit* di bidang literasi, dokumentasi, dan kegiatan budaya. Aktif sebagai pekerja sosial di beberapa organisasi perempuan di Indonesia, Korea dan Belanda seperti Nurani Perempuan, Srintil, Dian Stichting, Jes Rijnland, Epicentrum, Java Stichting, Restaurant Van Harte dan Indonesianvrouwen di Leiden. Ia juga mengelola penerbitan buku khususnya buku-buku Minangkabau, konten lokal, novel, cerpen dan esai dengan tema perempuan dan feminitas (TED.com, 2021).

Adanya *Stigma* masyarakat terhadap perempuan Indonesia khususnya pada budaya Jawa dan Minangkabau. Dimana perempuan harus berada dibawah laki-laki atau menjadi patuh didasari dari adanya budaya patriarki yang menyebabkan munculnya tanggapan bahwa pada sistem sosial laki-laki ditempatkan menjadi sosok utama dan harus berada di atas perempuan dalam suatu organisasi sosial. Posisi laki-laki berada di atas perempuan ini ditempatkan di segala aspek kehidupan, seperti budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Dalam budaya Jawa, terdapat banyak istilah-istilah yang menjadikan atau mendudukkan posisi perempuan menjadi lebih rendah daripada laki-laki (Hermawati, 2007).

Istilah-istilah tersebut pun sudah tertanam dalam benak atau hati masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga istilah tersebut akhirnya dimaklumi dan diterima begitu saja di tengah kehidupan bermasyarakat. Seperti contohnya, yaitu dalam istilah budaya Jawa ada yang menyebutkan bahwa seorang istri sebagai "*kanca wingking*", artinya yaitu teman belakang, sebagai teman seorang suami dalam mengelola urusan rumah tangga, khususnya seperti urusan mengurus anak, memasak, mencuci dan urusan rumah tangga lainnya. Adapun istilah lain "*suwarga nunut neraka katut*". Istilah ini ditujukan atau diperuntukkan bagi seorang istri, bahwa suami merupakan seseorang yang menentukan istri akan masuk surga atau neraka. Kalau suami masuk surga, berarti istri pun akan masuk surga, tetapi sebaliknya jika suami masuk neraka, walaupun istri berhak dapat masuk surga karena amal perbuatannya yang baik, tetapi ia tetap tidak berhak untuk masuk surga karena harus *katut* atau mengikuti suaminya masuk neraka (Hermawati, 2007). Selain itu, pada teks pidato yang disampaikan oleh GKR Hayu juga disebutkan istilah-istilah yang diberikan kepada perempuan

Jawa yang sudah dijelaskan di atas. Salah satu nya yaitu “*kanca wingking*” dimana beliau juga menekankan bahwa dari dulu perempuan Jawa sudah diposisikan dengan urusan dapur, sumur, dan kasur. Serta, GKR Hayu juga menjelaskan mengenai sebutan yang diberikan untuk istri-istri raja yang digolongkan menjadi berbagai *level* yaitu seperti “Permaisuri” yaitu untuk istri sah atau pertama dari raja. Selain itu ada “garwa padmi”, yang bisa disebut selir yang berada satu *level* di bawah “Permaisuri” (Hayu, 2020).



Gambar 1.1 Pidato GKR Hayu di TEDx Talks  
(Sumber : TEDx Talks Youtube Channel)

Budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia berkembang, tidak hanya di Pulau Jawa tetapi tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu nya yaitu Pulau Sumatera khususnya Suku Minangkabau. Kedudukan perempuan suku Minangkabau dibagi berdasarkan beberapa hal seperti status sosial dan menurut Adat Suku Minangkabau. Menurut status sosial terbagi menjadi 2 (Dua) yaitu Gadis dan Kawin. Gadis terbagi lagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu Aco-Aco Rumah Gadang, aco-aco disebut sebagai perca atau potongan kain. Di rumah gadang, aco-aco atau perca dari berbagai jenis kain yang ada disatukan dan membentuk sebuah kain besar untuk memiliki fungsi sebagai penutup loteng. Kain besar tersebut dinamai dengan *tabia sutopanyariang lawah*. *Tabia sutopanyariang lawah* memiliki 2 (dua) makna, yang pertama yaitu sebagai penghias, yang kedua disebut sebagai tempat atau wadah yang menyatukan kaya dengan miskin. Jadi bisa disimpulkan bahwa gadis dimaknai sebagai perca rumah

gadang yang memiliki 2 (dua) makna, yaitu sebagai penyemarak dan penyatu dalam keluarga (Noviarini, 2021).

Kedua yaitu *Limpapeh Korong jo Kampung*. *Limpapeh* merupakan jenis binatang atau satwa yang cukup terkenal dalam cerita *urban legend* masyarakat Minangkabau. *Limpapeh* biasanya diidentikan dengan *tmau*. Jika rumah dimasuki atau didatangi *limpapeh* (kupu-kupu) itu merupakan pertanda akan ada datangnya tamu. Maka dari itu, gadis Minang dimaknai sebagai *limpapeh korong jo kampung* atau peringatan bagi yang punya rumah atau tempat tinggal (orang tua, ninik mamak, bako) bahwa suatu saat rumah yang mereka huni akan banyak tamu yang datang. Jadi, anggota keluarga yang berada pada rumah tersebut harus memiliki persiapan yang baik khususnya persiapan ekonomi. Kedudukan sosial kedua yaitu Kawin, perempuan Minang yang sudah menikah akan memiliki peran, yaitu yang pertama sebagai Pamacik Kunci Bunian, kunci yang dimaksud yaitu disebut juga dengan kunci lumbung adat, yaitu tempat atau wadah untuk menyimpan harta (Noviarini, 2021).

Jadi, perempuan Minang memiliki fungsi sebagai pemegang kunci penyimpanan benda berharga yang mengandung makna bahwa perempuan Minang yang sudah menikah. Memiliki kuasa untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan ekonomi di rumah tangganya. Dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa pada budaya Minang, perempuan dibedakan dari status perkawinan yaitu gadis atau lajang dan perempuan yang sudah menikah. Dimana seorang perempuan Minang yang masih lajang atau gadis dianggap sebagai penyemarak atau seseorang yang diharapkan dapat memberikan kemenangan atau semangat yang diharapkan jika ia menikah (Noviarini, 2021).

Selain itu, gadis Minang dianggap sebagai pemersatu kedua keluarga jika ia menikah. Sedangkan perempuan Minang yang sudah menikah akan dianggap sebagai asisten atau *partner* suaminya untuk mengelola keuangan keluarga disaat sang suami bekerja (Noviarini, 2021). Seperti yang dijelaskan oleh Ka'Bati pada teks pidato nya bahwa perempuan Minang meski dirinya mengikuti garis keturunan ibu, perempuan minang tetap mendapatkan istilah-istilah seperti "Limpapeh rumah nan gadang", "Ambun puruak pagangan kunci", "Pusek jalo kumparan tali", "Nan Gadang Basa batuah", "Kapai tampek batanyo", dan "Ka

pulang tampek babarito”. Istilah-istilah tersebut memberikan beban terhadap perempuan Minang, beban-beban ini yang kemudian membuat dan mengkonstruksi pikiran perempuan Minang untuk tidak bisa merdeka dan tidak bebas lagi (Ka’Bati, 2018).



Gambar 1.2 Pidato Ka’Bati di TEDx Talks  
(Sumber : TEDx Talks Youtube Channel)

Akibat budaya patriarki yang terus berkembang di Indonesia tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera, perlahan juga dari peran yang dikembangkan dalam kebudayaan atau kehidupan *pra modern*, di mana dari ukuran fisik dan seluruh sistem otot para laki-laki dilihat lebih unggul, bersama dengan peran biologis perempuan yang melahirkan anak, serta menghasilkan suatu pembagian kerja yang dilihat atau berdasarkan dari jenis kelamin, yang masih berlaku hingga kehidupan saat ini. Kaum laki-laki dianggap sebagai penyedia kebutuhan hidup dan pelindung dalam menghadapi dunia atau hal *eksternal* di suatu keluarga itu. Tanggung jawab yang dipegang serta mendalam tersebut dianggap dapat memberikan otonomi dan kesempatan yang relatif besar. Pembagian kerja ini yang akhirnya menyebabkan berkembangnya peran-peran sosial yang terbatas di kehidupan bermasyarakat bagi kedua jenis kelamin ini, dan terciptanya perbedaan kekuasaan dalam beberapa hal lebih menguntungkan kaum laki-laki daripada kaum perempuan (Mulia, 2014).

Jenjang wewenang yang berasal dari perbedaan biologis tersebut akhirnya meluas secara mendalam ke dunia publik. Pada saat ini, kaum laki-laki banyak

mendominasi lembaga-lembaga pemerintahan seperti di bidang ekonomi, politik dan keagamaan. Peraturan-peraturan yang dianggap atau dipahami mempengaruhi lingkungan sebagian hanya dikarenakan lembaga-lembaga dan kekuasaan yang mereka wakili tetap ada dan terus beroperasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di Indonesia, di lingkungan pemerintahan, BUMN maupun swasta, perempuan yang telah mempunyai kesempatan untuk dapat menduduki jabatan, belum tentu sebanding dengan laki-laki. Padahal, jika dilihat dari segi jumlah, penduduk perempuan lebih banyak serta mendominasi daripada laki-laki. Meskipun kaum perempuan sudah mempunyai menteri atau pejabat wanita, duta besar wanita, jenderal wanita bahkan presiden wanita, namun hal tersebut semuanya masih dipandang perbedaan yang sangat jauh jumlahnya bila jika dibandingkan dengan laki-laki yang menduduki sebuah jabatan tersebut (Hermawati, 2007).

- Perkembangan budaya patriarki di Indonesia juga didukung dengan adanya media massa yang memberikan pemberitaan yang masih memarginalkan perempuan di beberapa pemberitaannya. Seperti salah satunya yaitu pemberitaan mengenai kekerasan seksual yang dialami perempuan sebagai korban. Masih banyak pemberitaan di media massa masih menempatkan perempuan sebagai obyek. Semua identitas yang menempel dalam diri korban diungkapkan oleh media. Media tidak mewawancarai perempuan sebagai korban, melainkan mengungkap identitas korban melalui peliputan ke lingkungan masyarakat tempat korban tinggal. Beberapa pemberitaan yang dimuat justru merugikan korban. Contohnya yaitu penulisan-penulisan yang ada di dalam artikel berita seperti, “korban memakai pakaian tanpa lengan”, “korban secara sukarela diajak pergi oleh pelaku”, dan “korban sudah kenal dengan pelaku”. Selain itu, hal tersebut semakin didukung dengan adanya jurnalis dan organisasi atau perusahaan media yang berdiri di lingkungan masyarakat masih dipenuhi *stigma* dari budaya patriarki (Kurniawan, 2020).

Selain itu, terdapat 3 (tiga) penelitian terdahulu yang telah meneliti bagaimana perempuan Indonesia disajikan di Media selama ini. Pertama ialah “*Blaming The Victim : Representasi Perempuan Korban Pemerkosaan di Media Massa*” oleh Dani Marsa Aria Putri. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa

Mayoritas perempuan yang menjadi korban pemerkosaan digambarkan secara tidak seimbang oleh para jurnalis. Selain digambarkan secara tidak seimbang, pemilihan deskripsi, kata, atau penjelasan mengenai korban cenderung disalahkan atas kejadian yang menimpa para perempuan. Perempuan sebagai korban dianggap sebagai penyebab dan ikut berperan besar atas kejadian pemerkosaan yang menimpanya. Perempuan selaku korban tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau keterangan untuk membela dirinya atas kejadian pemerkosaan ini (Putri, 2012).

Kedua yaitu penelitian berjudul “*Gender dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Media Online*” oleh Rissa Indrasty, Darajat Wibawa, & Rojudin. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa salah satu portal media *online* pojoksulsel.com menyajikan pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menempatkan pihak laki-laki sebagai tersangka pada posisi di atas perempuan yang tentunya mengakibatkan pihak laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan. Pada pemberitaan ini, laki-laki sebagai tersangka memiliki kuasa dalam mendefinisikan atau menjelaskan segala peristiwa. Selain itu, keterangan peristiwa yang disampaikan oleh pihak laki-laki merupakan keterangan yang paling dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh pihak media dan polisi sebagai sumber informasi masyarakat luas. Sehingga posisi dan perilaku dari pihak perempuan semata-mata didapatkan hanya dari pernyataan yang diberikan oleh pihak laki-laki (Indrasty, Wibawa, & Rojudin, 2018).

Lalu yang ketiga yaitu penelitian yang berjudul “*Framing Media Online Tribunnews.Com Terhadap Sosok Perempuan Dalam Berita Video Pornografi Depok*” oleh Maudy Fitri Hutami dan Nuryah Asri Sjaifarah. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa fokus pemberitaan yang diambil oleh Tribunnews.com sebagai media *online* yaitu tertuju pada pihak perempuan yang melakukan adegan di video pornografi tersebut. Pada pemberitaan yang mengobjekkan pihak perempuan seperti itu, maka pihak perempuan akan menjadi korban,. Terlebih setelah pemberitaannya keluar dengan deskripsi atau kata-kata yang secara tidak langsung menjatuhkan pihak perempuan dan pada pemberitaan ini dikaitkan dengan kehidupan pribadinya (Hutami & Sjaifarah, 2018).

Adanya pandangan budaya patriarki ini membuat sebagian masyarakat yang kontra terhadap pandangan ini, banyak yang menyuarakan pandangan mereka mengenai kesetaraan *gender* atau keadilan *gender*. Pandangan ini menyatakan bahwa masyarakat percaya bahwa semua orang dari latar belakang manapun memiliki dan mendapat perlakuan yang sama atau setara terhadap satu sama lain. Pandangan ini menganggap tidak ada penempatan utama atau sentral bagi suatu *gender*. Maka dari itu, masyarakat khususnya perempuan yang menganggap bahwa permasalahan mengenai kesetaraan *gender* tidak kunjung usai karena masih terjadi dan ada di lingkungan sekitar kehidupan masyarakat. Akhirnya beberapa pihak akhirnya menyebutkan diri mereka sebagai seorang “*feminist*” untuk memperjuangkan hak-hak nya. Beberapa tokoh masyarakat yang menyuarakan gerakan “*feminist*” ialah Simone de Beauvoir, Eleanor Roosevelt, Marlene Dietrich, Betty Friedan, Gloria Steinem dan Angela Davis (Fisher, 2020).

- Pada dasarnya, semua orang atau masyarakat sepakat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki suatu hal yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik masing-masing jenis kelamin secara fisik, akan sangat mudah membedakannya. Perbedaan alami yang dikenal sebagai perbedaan jenis kelamin ini sebenarnya hanyalah dari perbedaan biologis yang dibawa atau dimiliki sejak lahir antara perempuan dan laki-laki. Jika saja perbedaan tersebut tidak membuat atau menjadikan ketidakadilan, tidak menjadikan pertentangan dan tidak adanya penekanan serta penindasan satu di antara yang lainnya, mungkin saja tidaklah akan menjadi sebuah masalah. Pada kenyataannya, perbedaan tersebut telah merambat pada salah satu pihak yang merasa dan dianggap lebih tinggi derajatnya, lebih berkuasa serta lebih segalanya dari pihak lain di segala aspek kehidupan masyarakat. Hal inilah yang akhirnya memunculkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan pada kaum perempuan dan laki-laki (Hermawati, 2007)

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau lebih dikenal di masyarakat dengan istilah kesetaraan *gender* telah menjadi isu yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Melalui perjalanan yang panjang untuk meyakinkan dunia bahwa kaum perempuan telah mengalami ketidakadilan dan diskriminasi hanya adanya perbedaan jenis kelamin dan perbedaan secara sosial di tengah



kehidupan bermasyarakat, akhirnya pada tahun 1979, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui konferensi mengenai penghapusan segala bentuk ketidakadilan serta diskriminasi terhadap kaum perempuan. Konferensi ini sebenarnya telah dikonfirmasi oleh Indonesia pada tahun 1984 menjadi terciptanya UU No. 7/1984, tetapi sangat jarang disosialisasikan dengan baik oleh Negara kepada masyarakat. Konferensi maupun Undang-Undang yang telah disusun pada kenyataannya akhirnya tidak dapat juga sanggup menghapus diskriminasi atau ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di kehidupan bermasyarakat. Di seluruh dunia masih ada kaum perempuan yang mengalami segala bentuk kekerasan seperti, kekerasan fisik, sosial, mental maupun ekonomi baik di rumah tempat dirinya tinggal, di tempat mereka bekerja maupun di tengah-tengah masyarakat (Hermawati, 2007).

Dari latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, peneliti memilih kedua pidato tokoh perempuan dari 2 (dua) latar belakang yaitu GKR Hayu dan Ka'Bati pada penelitian ini. Alasannya yaitu kedua tokoh perempuan tersebut merupakan tokoh perempuan yang aktif menyuarakan pendapat serta dukungannya untuk kesetaraan kaum perempuan dan laki-laki di masyarakat khususnya di Indonesia. Terlebih kedua tokoh perempuan ini berasal dari etnis Jawa dan Minang. Selain itu, banyak perbedaan antara etnis Jawa dan Minang yaitu Suku Jawa merupakan suku yang menganut sistem parental ataupun bilateral. Sistem ini ialah sistem kekerabatan yang menarik garis generasi dari kedua orang tua. Dalam perihal pernikahan di suku Jawa, pihak perempuan yang dinilai mulia sehingga pihak perempuan menjadi pihak yang dilamar pada saat menikah. Berbeda dengan suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal atau matriarkhat ialah sistem kekerabatan yang garis keturunannya berasal dari ibu. Berkebalikan dengan pernikahan suku Jawa, suku Minangkabau memperhitungkan tinggi seseorang laki-laki sehingga pihak laki-laki yang dilamar oleh pihak perempuan tidak hanya itu, apalagi dalam kehidupan sehari-hari juga adat Jawa dan adat Minangkabau bertolak belakang, terlebih dari teknik berkomunikasi. Orang Jawa yang populer dengan budaya "pakewuh" nya sangat berbeda dengan orang Minangkabau yang populer lugas dalam berdialog.

Sehingga dalam satu keluarga yang terdiri dari suku Jawa dan suku Minangkabau ada banyak perbedaan dalam berkomunikasi (Hestiana, 2015).

Kedua pidato perempuan Indonesia dengan 2 (dua) latar belakang kebudayaan yang berbeda ini menarik untuk diteliti menggunakan metode analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk. Karena adanya tata Bahasa yang digunakan di dalamnya. Selain itu, metode analisis wacana kritis model Van Dijk ini dapat mengelaborasi berbagai elemen wacana sehingga dapat digunakan dan dipakai dengan praktis. Model wacana kritis ini memiliki paham bahwa suatu penelitian atas wacana tidak cukup jika hanya didasarkan pada analisis atas teks saja. Hal tersebut dikarenakan sebuah teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang perlu juga diamati. Selain itu, perlu juga dilihat bagaimana suatu teks diproduksi, karena analisis wacana tidak hanya terbatas pada struktur teks, tetapi juga bagaimana teks tersebut dibangun atau diproduksi (Eriyanto, 2017).

- Van Dijk menawarkan analisis yang disebut kognisi sosial. Menurut Van Dijk, analisis wacana tidak terbatas hanya pada struktur teks, karena struktur pembahasan itu sendiri mencerminkan atau membawa banyak makna, pendapat dan ideologi. Untuk memahami makna tersembunyi di dalam teks, perlu adanya analisis kognisi dan konteks sosial. Cara berpikir didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak memiliki makna. Oleh karena itu, perlu dikaji representasi kognitif dan strategi jurnalis dalam memproduksi berita. Karena setiap teks pada dasarnya dibuat atau dihasilkan melalui pengetahuan, kesadaran, bias, atau pengetahuan khusus tentang peristiwa tersebut. Selain itu, bagian ketiga dari analisis van Dijk ialah analisis sosial. Wacana merupakan bagian dari tuturan yang berkembang dalam suatu masyarakat, oleh karena itu untuk mengkaji teks perlu dilakukan analisis tekstual dengan mengkaji bagaimana kata-kata diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Maka dari itu, model wacana kritis oleh Van Dijk diharapkan dapat membongkar produksi dan reproduksi wacana kesetaraan *gender* yang disampaikan oleh 2 (dua) tokoh perempuan Indonesia (Eriyanto, 2017).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, peneliti dapat merumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah struktur (makro, superstruktur, dan mikro) teks pidato pesan kesetaraan *gender* oleh GKR Hayu dan Ka'bati menurut kajian Van Dijk ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari paparan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur (makro, superstruktur dan mikro) teks pidato pesan kesetaraan gender oleh GKR Hayu dan Ka'bati menurut kajian Van Dijk.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Manfaat yang dapat dihasilkan dari adanya penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini dapat memperkaya penelitian terkait, pertama mengenai penggunaan wacana kritis pada level “teks” pidato kesetaraan *gender* dari perempuan Indonesia dengan latar belakang budaya berbeda (etnis Jawa dan etnis Padang). Kedua, mengembangkan penggunaan konsep komunikasi antar budaya pada tataran teks terkait kesetaraan *gender*. Ketiga, mengembangkan penelitian terkait pesan kesetaraan *gender* dari sudut pandang perempuan sebagai kalangan ter-sub ordinasi dalam budaya patriarki.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para komunikator dalam menyusun pesan isu sosial, khususnya terkait *gender* agar dapat diterima target sasaran secara efektif.

